

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan sekolah adalah salah satu bangunan atau ruang di sekolah, berisi berbagai koleksi dalam bentuk cetak dan non cetak, yang bertujuan menyediakan berbagai sumber pengetahuan yang bernilai informasi, edukasi, dan hiburan, sehingga dapat digunakan para siswa untuk menambah pengetahuan. Melalui perpustakaan, keingintahuan siswa terhadap ilmu pengetahuan dapat diperoleh tanpa harus menunggu informasi tersebut disampaikan oleh guru di dalam kelas.

Perpustakaan memerlukan sarana dan prasarana yang menunjang keberlangsungan tugas perpustakaan di sekolah. Koleksi merupakan bagian dari sarana yang mutlak diperlukan perpustakaan, untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, sosial, dan kejiwaan para penggunanya. Keberadaan koleksi idealnya menjadi fokus pengembangan perpustakaan sekolah di Indonesia, kenyataannya sangat sedikit perpustakaan yang memiliki koleksi yang baik, bahkan masih banyak perpustakaan sekolah yang tidak memiliki perpustakaan.

Untuk mendapatkan koleksi yang sesuai dengan tujuan sekolah, diperlukan suatu kebijakan. Kebijakan yang mengatur perpustakaan sekolah untuk terus memutakhirkan koleksi yang ada secara berkala, yaitu kebijakan pengembangan koleksi atau *collection development policy*. Kebijakan pengembangan koleksi memiliki keterkaitan dengan kebijakan dan program

lainnya yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah, kebijakan dan program itu antara lain program pendidikan wajib 9 tahun, revisi kurikulum, dan subsidi dana pendidikan.

Program wajib belajar sembilan tahun merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar. Pendidikan dasar meliputi jenjang Sekolah Dasar (SD), selama enam (6) tahun dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) selama tiga (3) tahun. Pendidikan dasar akan menjadi landasan pendidikan tiap siswa untuk melaju ke jenjang pendidikan selanjutnya, sehingga diperlukan dasar yang kuat berupa sarana dan prasarana, di antaranya perpustakaan

Kebijakan pemerintah lainnya adalah merevisi kurikulum pendidikan. Semenjak pendidikan berlangsung di Indonesia, tercatat telah enam (6) kurikulum diterapkan, yaitu kurikulum 1968, 1975, 1984, atau lebih dikenal dengan kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), kurikulum 1994, 2004, dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada pertengahan tahun 2006. Perubahan kurikulum didasari oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Sehingga untuk mencegah ketertinggalan pengetahuan dengan negara-negara lain, diperlukan revisi kurikulum secara berkesinambungan. KTSP merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu KBK, dan memerlukan media pembelajaran yang disesuaikan dengan mata pelajaran dari tiap-tiap jenjang pendidikan. Perpustakaan

sebagai pusat informasi idelanya dapat menyelenggarakan media pembelajaran yang diperlukan dalam menunjang pendidikan.

Kebijakan pengembangan koleksi diperlukan oleh perpustakaan sekolah dalam menyediakan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, untuk mensukseskan program pendidikan dasar dan mendukung kurikulum pendidikan terbaru (KTSP). Penerapan kebijakan pengembangan koleksi juga memerlukan sejumlah dana, sehingga kebijakan pengembangan koleksi dapat berjalan.

Pada bulan Juni tahun 2005 pemerintah meluncurkan dana kompensasi bahan bakar minyak untuk keperluan pendidikan. Dana ini bernama Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), yang memungkinkan tiap sekolah dasar untuk membebaskan siswa dari biaya pendidikan dan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada. Untuk sekolah-sekolah yang menerima dana tersebut, pemerintah menginstruksikan untuk tidak menarik biaya pendidikan.

Bentuk dukungan terhadap pendidikan di Indonesia ditunjukkan pula dengan menyediakan buku pelajaran, yang diberikan secara gratis di tiap sekolah. Dana pembelian buku diperoleh melalui dana BOS Buku. Keberadaan buku pelajaran menjadi suatu keharusan, karena merupakan sumber informasi utama yang digunakan guru dan siswa dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah.

Kebijakan pengembangan koleksi perlu diaplikasikan di perpustakaan sekolah, agar perpustakaan memiliki koleksi yang cukup baik dari segi kualitas dan kuantitas. Kebijakan pengembangan koleksi harus dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga kemutakhiran koleksi. Namun diperlukan

sejumlah bahan perpustakaan yang menjadi koleksi dasar dan harus dimiliki perpustakaan.

Pemerintah telah menetapkan standar buku yang dimiliki perpustakaan dalam peraturan pemerintah, yaitu

“Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap siswa.” (PP Nomor 19 tahun 2005, pasal 43)

Jika sebuah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) memiliki 12 mata pelajaran, maka setidaknya perpustakaan memiliki dan meminjamkan 12 judul buku untuk tiap siswa, sesuai dengan jumlah mata pelajaran yang ada. Sedangkan ketentuan dari Perpustakaan Nasional, setidaknya diperlukan 1000 judul atau perbandingan 12 judul/ siswa sebagai koleksi dasar, yang harus dipenuhi perpustakaan dalam kurun waktu 5 tahun, sehingga sebuah perpustakaan sekolah dapat dikatakan ideal dalam hal koleksi (Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, 2000:16).

Saat ini jumlah perpustakaan di sekolah masih sangat minim, dari 20.866 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Indonesia, perpustakaan hanya dimiliki oleh 2.905 sekolah (13,92%) (Zen, 2006:7). Berdasarkan data tersebut tidak dapat dipastikan dari 2.905 perpustakaan sekolah yang ada, berapa banyak perpustakaan yang memiliki 1000 judul. Sedangkan menurut ketentuan Perpustakaan Nasional setidaknya diperlukan 1000 judul. Mengingat perolehan koleksi tiap SLTP Negeri umumnya didapat dari sumbangan pemerintah yang diberikan pada periode tertentu dan bersifat temporer. Sedangkan perolehan buku melalui sumbangan

lainnya tidak memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penambahan jumlah koleksi secara keseluruhan.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk mendapatkan koleksi yang sesuai dalam mutu dan jumlah, maka perpustakaan sekolah perlu memiliki kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi bertujuan sebagai pedoman atau panduan perpustakaan sekolah dalam mengadakan koleksi. Kebutuhan sumber informasi yang beraneka ragam dan perbedaan kebijakan yang diambil oleh masing-masing kepala sekolah atau pengelola perpustakaan terhadap perpustakaan sekolah, mengakibatkan perkembangan perpustakaan di tiap-tiap sekolah tumbuh secara tidak merata. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis meneliti pengembangan koleksi perpustakaan di tiga (3) SLTP Negeri di Jakarta.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengembangan koleksi di perpustakaan sekolah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bahan evaluasi terhadap pengembangan koleksi perpustakaan terutama perpustakaan sekolah.

2. Masukan kepada pemerintah, yang dapat digunakan pada lembaga terkait dalam mendukung kebijakan pengembangan koleksi
3. Kontribusi terhadap pengembangan ilmu perpustakaan di Indonesia.

